

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tugas penting bagi manajemen perusahaan adalah melakukan penyusunan laporan keuangan setiap tahun (Sugiono dkk, 2012:viii). Menurut Santoso (2012:32) pelaporan keuangan merupakan bagian yang penting dan tak terpisahkan dalam perusahaan yang berasal dari proses akuntansi meliputi pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan sarana komunikasi ekonomi yang berguna bagi pihak internal dan eksternal. Pelaporan keuangan adalah suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan untuk keperluan eksternal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Gibson, 2009:55).

Menurut Santoso (2012:32) kualitas pelaporan keuangan akan memengaruhi kondisi dan nilai perusahaan, namun tidak semua perusahaan dapat menyajikan pelaporan keuangan yang berkualitas dikarenakan perlu mempertimbangkan bahwa manfaat lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, padahal bagi perusahaan besar cenderung memiliki banyak pemegang kepentingan seperti investor, kreditor dan publik, maka pelaporan keuangan yang diterbitkan harus berkualitas dan relevan.

Undang-Undang Republik Indonesia No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi. Teknologi

informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan apa saja termasuk kata-kata, bilangan dan gambar (Yaumi, 2018:173).

Teknologi informasi akan mendorong proses pelaporan keuangan organisasi modern, dimana sistem akan otomatis menginisiasikan, mengotorisasi, mencatat dan melaporkan efek dari transaksi keuangan (Hall, 2015:650). Pemanfaatan teknologi informasi yang baik diharapkan dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang andal dan tepat waktu (Roshanti dkk, 2014:2). Peranan teknologi informasi besar sekali dalam membantu seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan saat berbisnis dan mengolah data akuntansi untuk menghasilkan informasi akuntansi bagi kepentingan manajemen dan pihak lain diluar perusahaan yang berkepentingan dengan perusahaan (Susanto, 2010:1-3).

Fenomena yang terjadi pada kualitas pelaporan keuangan diungkapkan oleh Yenny Soetjipto (2016) selaku Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yaitu salah satu sumber kerugian negara diduga disebabkan buruknya perencanaan keuangan saat pembelanjaan. Sistem perencanaan yang buruk meliputi teknis administrasi, kesalahan pencatatan, alokasi penganggaran yang tidak tepat dan sebagainya. Yuke Sri Rahayu (2017) selaku Kepala Sub Direktorat Perbankan Syariah Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mengatakan bahwa meski belum terdata secara pasti UMKM yang telah mampu menyusun laporan keuangan, setiap kali mereka menggelar pelatihan terhadap UMKM, hanya 20% yang mampu menyusunnya itupun masih dilakukan secara manual belum digital sesuai harapan, untuk membuat laporan keuangan

seperti pencatatan hutang, piutang atau bahkan neraca rugi laba, kalangan pelaku usaha kecil masih kesulitan.

Minhajuddin Ahmad (2013) selaku Anggota DPRD Parepare menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dua SKPD Parepare sangat buruk, laporan keuangan kecil seperti pajak tidak ada, *problem* lainnya adalah soal aset karena tidak ada kartu inventarisasi aset yang dimiliki masing-masing SKPD, sejumlah SKPD belum secara maksimal memanfaatkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD), yang baru terkoneksi hanya bagian penganggaran, khusus bagian perbendaharaan dan akuntansi masih menggunakan cara manual, itu pula yang menjadi penyebab buruknya laporan keuangan daerah. Menurut Tahria Syfrudin (2012) selaku Ketua Badan Pengawas dan Pembangunan (BPKP) mengatakan bahwa rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintah, temuan BPK juga menunjukkan sebagian besar laporan keuangan pemda mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bermasalah pada pencatatan aset/barang milik daerah, umumnya hal itu terjadi karena pencatatan, keberadaan fisik dan pengungkapannya dalam laporan belum memadai. Ansori Sinungan (2016) selaku Wakil Ketua Komnas HAM mengatakan bahwa Komnas HAM salah satu lembaga yang mendapat *disclaimer* dalam laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), *disclaimer* ini diakui Komnas HAM karena adanya ketidaktertiban administrasi, kedua soal sistem, ada sistem baru belum tersosialisasi dengan teman-teman yang ada di manajemen keuangan sehingga mereka masih menerapkan sistem yang lama kemudian Komnas HAM dari periode ke periode itu tentunya dari yang lalu tertinggal

diteruskan berikut terus berikut termasuk kasus-kasus dari periode sebelum diselesaikan di periode berikutnya termasuk manajemen.

Sangatlah penting untuk memahami masalah yang mungkin terjadi dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat diambil tindakan pencegahan guna memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari *error* (Lee, 2012:125). Berdasarkan uraian pengertian dan fenomena yang telah dijabarkan sebelumnya maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan variabel teknologi informasi yang digunakan dan kualitas pelaporan keuangan serta seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh teknologi informasi yang digunakan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Seberapa besar pengaruh teknologi informasi yang digunakan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Mengetahui seberapa besar pengaruh teknologi informasi yang digunakan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat bagi akademisi

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan untuk akademisi dan profesi dalam rangka mengkaji dan mengembangkan masalah kualitas pelaporan keuangan.

b. Manfaat bagi praktisi bisnis

Penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaporan keuangan dan memberikan informasi mengenai pengaruh yang ditimbulkan teknologi informasi yang digunakan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi serta dapat dijadikan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki tema sejenis.

